

PROFIL
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya.

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 25 Oktober 2024

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Agus Heli Junianto, ST.,MT.

NIP. 196906121998031019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN	7
1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PROFIL PUG	9
BAB II PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG	10
2.1 GAMBARAN UMUM	10
2.2 VISI DAN MISI	10
2.3 DEMOGRAFI	11
2.4 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	17
2.4.1 KEBUJAKAN	17
2.4.2 SOSIALISASI PUG	17
2.4.3 SDM TERLATIH PUG	22
2.4.4 DATA TERPILAH DAN SISTEM PUBLIKASINYA	23
BAB III PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH	24
3.1 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)	24
3.2 PELAKSANAAN	28
3.3 PEMANTAUAN DAN EVALUASI	31
3.4 PENGAWASAN	32
3.5 PELAPORAN	33
BAB IV TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA	34
4.1 ANALISA	34
4.2 KESIMPULAN	34
4.3 TATALAKSANA MASALAH YANG SUDAH DILAKSANAKAN DAN REKOMENDASI/SARAN	34
BAB V INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER	

(GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	36
5.1 KEGIATAN DAN INOVASI YANG TELAH DILAKSANAKAN	36
BAB VI PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Susunan Tim Focal Point PUG BPBD	22
Tabel 3.1 Anggaran Responsif Gender BPBD 2024	28
Tabel 5.1 Inovasi BPBD Kota Surabaya Tahun 2024	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya	16
Gambar 2.2 Surat Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan SK Tim Focal Point BPBD	18
Gambar 2.3 Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penyusunan SK Tim Focal Point BPBD	19
Gambar 2.4 Resume Rapat Koordinasi Penyusunan SK Tim Focal Point BPBD	19
Gambar 2.5 Foto Dokumentasi Rapat Koordinasi Penyusunan SK Tim Focal Point BPBD	20
Gambar 2.6 Surat Undangan Rapat Koordinasi Pengisian Data Terpilah BPBD	20
Gambar 2.7 Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengisian Data Terpilah BPBD	21
Gambar 2.8 Resume Rapat Koordinasi Pengisian Data Terpilah BPBD	21
Gambar 2.9 Foto Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengisian Data Terpilah BPBD	21
Gambar 3.1 Alur Proses Penyelenggaraan PUG di Perangkat Daerah	24
Gambar 3.2 Kegiatan Sekolah Tanggap Bencana	28
Gambar 3.3 Kegiatan Kelurahan Tanggap Bencana	29
Gambar 3.4 Pengadaan Kantong Jenazah	29
Gambar 3.5 Penanganan Luka oleh Anggota Perempaan BPBD Kota Surabaya	29
Gambar 3.6 Pendistribusian Bantuan Logistik pada Korban Bencana	30
Gambar 3.7 Ruang Laktasi BPBD Kota Surabaya	30
Gambar 3.8 Pelatihan Vertical Rescue	31
Gambar 3.9 Pelatihan Perungutan Hewan Liar	31
Gambar 3.10 Rekap Pengerjaan PPRG 2024	32
Gambar 4.1 Fishbone Analisa PPRG BPBD Kota Surabaya	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak;

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77);
8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA;
9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023;
10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya;
11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya.

1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kementerian PPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2024

BAB II

PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum

Dalam Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021, tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 113 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, bahwa kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan Ketangguhan Terhadap Bencana dan Berkelanjutan

b. Misi

- Memperkuat budaya sadar bencana
- Melaksanakan sinergi pertabelix dalam upaya penanggulangan bencana
- Mengembangkan sistem penanggulangan bencana berbasis sains dan teknologi

2.3 Demografi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jemursari Timur II No.2 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya memiliki 2 gudang logistik yaitu di Meko Jemursari dan Gudang Hitech Mall. Sebagai penunjang kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya memiliki 7 Posko Terpadu dan 15 Pos Pantau yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya dan beroperasi 24 jam. Lokasi Posko Terpadu dan Pos Pantau BPBD Kota Surabaya diantaranya :

- a. Posko Terpadu Kedung Cowek (Jl. Kedung Cowek No.350, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur 60129)
- b. Posko Terpadu Timur (Jl. Arif Rahman Hakim No.100 Kel. Klampis Ngusum, Kec. Sakolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117)
- c. Posko Terpadu Selatan (Jl. Dukuh Menanggal No.1 Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234)
- d. Posko Terpadu Dukuh Pakis (Jl. Mayjen Sungkono No.122 Kel. Gunung Sari, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur 60224)
- e. Posko Terpadu Barat (Jl. Raya Balongsari, Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur 60186)
- f. Posko Terpadu Utara (Jl. Kasuari No.1, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60175)
- g. Posko Terpadu Pusat (Jl. Tunjungan No.1-3, Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60275)
- h. Pos Pantau Wiyung (Jl. Rayn Wiyung, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Surabaya, Jawa Timur 60228)
- i. Pos Pantau KBS (Jl. Setail No.1, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur 60241)
- j. Pos Pantau Gor Pancasila (Jl. Padmosusastro No.12, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur 60256)
- k. Pos Pantau Taman Bungkul (Jl. Taman Bungkul, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur 60241)
- l. Pos Pantau Bambu Runcing (Jl. Panglima Sudirman, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271)
- m. Pos Pantau Genteng Besar (Jl. Genteng Besar, Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60275)
- n. Pos Pantau Sedap Malam (Jl. Sedap Malam, Kel. Ketabung, Kec. Genteng,

Surabaya, Jawa Timur 60272)

- o. Pos Pantau Tidar (Jl. Tidar No.111, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60252)
- p. Pos Pantau Indrapura (Jl. Indrapura No.3, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60175)
- q. Pos Pantau Tugu Pahlawan (Jl. Pahlawan, Kel. Alun-alun Contong, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174)
- r. Pos Pantau Taman Sejarah (Jl. Taman Jayengrono No.2-4, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60175)
- s. Pos Pantau Merr RSIA (Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.2, Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60134)
- t. Pos Pantau UKM Merr (Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.11, Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60298)
- u. Pos Pantau Panjang Jiwo (Jl. Panjang Jiwo, Kel. Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60299)
- v. Pos Pantau Taman Pelangi (Jl. Ahmad Yani No.138, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235)

Dalam Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021, tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1. KEPALA BADAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. melaksanakan tugas dukungan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, sedangkan fungsinya :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- l. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- o. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Peningkat Daerah;
- p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Keuangan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

3. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, sedangkan fungsinya :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/ rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur pencegahan bencana dan pengurangan resiko bencana;
- f. pelaksanaan peninjauan lapangan, evaluasi dan pelaporan evaluasi data pencegahan bencana;
- g. pelaksanaan pemetaan potensi bahaya atau ancaman bencana;
- h. pelaksanaan penyusunan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis dan simulasi dan gladi dalam hal pengurangan resiko bencana;
- i. pelaksanaan pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Satgas Siaga Bencana di kecamatan dan kelurahan;
- k. pelaksanaan pengolahan dan analisis data kesiapsiagaan bencana;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi aparat;
- m. pelaksanaan penyusunan konsep laporan dan evaluasi tentang kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional

4. BIDANG KEDARURATAN, LOGISTIK, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kedaruratan, logistik,

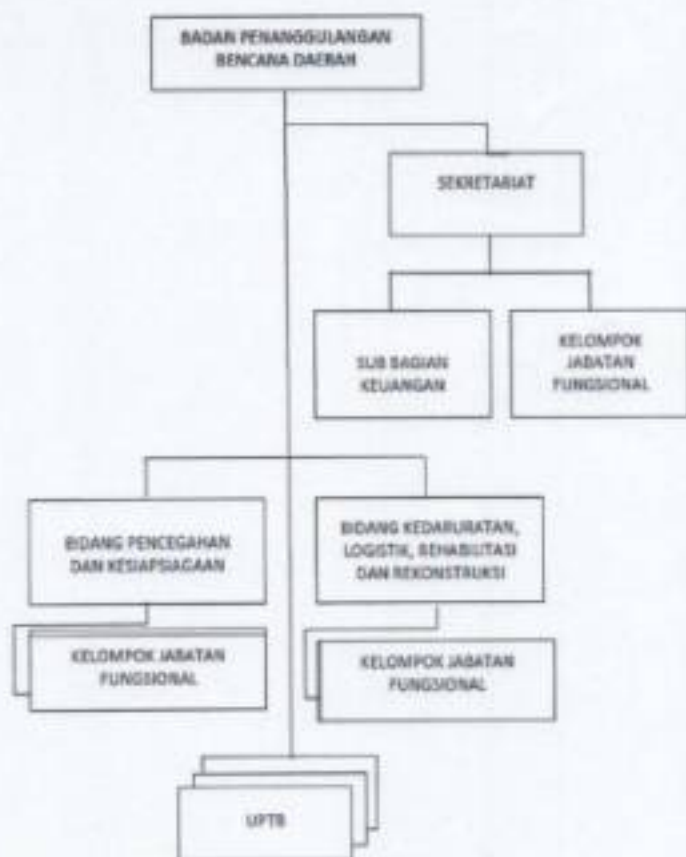
rehabilitasi dan rekonstruksi sedangkan fungsinya :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/ rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep rencana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- f. pelaksanaan pengumpulan data, observasi lapangan, analisis dan penyajian data tentang kronologis bencana, jumlah korban dan jumlah sarana prasarana yang rusak;
- g. pelaksanaan penanganan korban bencana dan pengungsi;
- h. pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengeralihan SDM dalam rangka menjaga ketertarikan, ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan penyiapan SDM dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan pos pantau bencana sebagai media informasi;
- k. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis dan standar manajemen logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- l. pelaksanaan pengolahan dan analisis data logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- m. pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial korban-korban bencana;
- n. pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- o. pelaksanaan penyusunan konsep laporan dan evaluasi tentang kegiatan operasional penanggulangan bencana dan distribusi logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

1) Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya gambaran struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 113 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 10 Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya adalah sebagaimana ditunjukkan di bawah ini, yaitu tentang bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Surabaya

2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

2.4.1 Kebijakan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya memiliki regulasi / kebijakan sebagai landasan hukum penyelenggara PUG secara komprehensif yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2 / 0043 / 436.8.5 / 2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 188.45 / 146 / 436.1.2 / 2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya perlu ditetapkan SK anggota Focal Point PUG Kota Surabaya.

2.4.2 Sosialisasi PUG

Kegiatan sosialisasi PUG di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dilaksanakan dua kali.

1. Hari/Tanggal : Selasa, 2 Januari 2024
Tempat : Ruang Rapat Lt.2 BPBD Kota Surabaya
Acara : Rapat Koordinasi terkait Penyusunan SK Tim Focal Point BPBD Kota Surabaya



Gambar 2.2
Surat Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan SK Tim Focal Point BPBD



DAFTAR HADIR

Waktu : 08.00 - 10.00
 Tempat : Ruang Rapat BPBD
 Agenda : Koordinasi Penyusunan SK Tim Focal Point BPBD

No	Nama	Instansi	Daftar Hadir
1	Plt. Kepala BPBD	BPBD	✓
2	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
3	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
4	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
5	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
6	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
7	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
8	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
9	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
10	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
11	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
12	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
13	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
14	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
15	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
16	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
17	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
18	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
19	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓
20	Plt. Kepala Dinas	Dinas	✓

No	Nama	Instansi	Daftar Hadir
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



Gambar 2.3
Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penyusunan SK Tim Focal Point BPBD



RESUME RAPAT

Waktu : 08.00 - 10.00
 Tempat : Ruang Rapat BPBD
 Agenda : Koordinasi Penyusunan SK Tim Focal Point BPBD

Hasil Rapat :

1. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
2. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
3. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
4. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
5. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
6. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
7. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
8. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
9. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
10. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
11. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
12. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
13. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
14. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
15. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
16. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
17. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
18. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
19. Menetapkan Tim Focal Point BPBD
20. Menetapkan Tim Focal Point BPBD

Tanda Tangan :

1. Kepala BPBD
 2. Kepala Dinas
 3. Kepala Dinas
 4. Kepala Dinas
 5. Kepala Dinas
 6. Kepala Dinas
 7. Kepala Dinas
 8. Kepala Dinas
 9. Kepala Dinas
 10. Kepala Dinas
 11. Kepala Dinas
 12. Kepala Dinas
 13. Kepala Dinas
 14. Kepala Dinas
 15. Kepala Dinas
 16. Kepala Dinas
 17. Kepala Dinas
 18. Kepala Dinas
 19. Kepala Dinas
 20. Kepala Dinas

Gambar 2.4
Resume Rapat Koordinasi Penyusunan SK Tim Focal Point BPBD



Gambar 2.5

Foto Dokumentasi Rapat Koordinasi Penyusunan SK Tim Focal Point BPBD

2. Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
 Tempat : Ruang Rapat Lt.1 BPBD Kota Surabaya
 Acara : Rapat Koordinasi terkait money untuk pengisian Data
 Terpilah BPBD



Gambar 2.6

Surat Undangan Rapat Koordinasi Pengisian Data Terpilah BPBD



DAFTAR HADIR

Waktu: 14.00 - 16.00
 Tempat: Ruang Rapat BPBD
 Agenda: Koordinasi Pengisian Data Terpilah BPBD

No	Nama	Instansi	Daftar Hadir
1	Agus Setiawan	BPBD Kota Surabaya	✓
2	Agus Setiawan	BPBD Kota Surabaya	✓
3	Agus Setiawan	BPBD Kota Surabaya	✓
4	Agus Setiawan	BPBD Kota Surabaya	✓
5	Agus Setiawan	BPBD Kota Surabaya	✓
6	Agus Setiawan	BPBD Kota Surabaya	✓
7	Agus Setiawan	BPBD Kota Surabaya	✓
8	Agus Setiawan	BPBD Kota Surabaya	✓
9	Agus Setiawan	BPBD Kota Surabaya	✓
10	Agus Setiawan	BPBD Kota Surabaya	✓



Gambar 2.7
Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengisian Data Terpilah BPBD



RESUME RAPAT

Waktu: 14.00 - 16.00
 Tempat: Ruang Rapat BPBD
 Agenda: Koordinasi Pengisian Data Terpilah BPBD

Hasil Rapat:

1. Pembukaan
2. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
3. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
4. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
5. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
6. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
7. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
8. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
9. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
10. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya

Penutup:

1. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
2. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
3. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
4. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
5. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
6. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
7. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
8. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
9. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya
10. Laporan oleh BPBD Kota Surabaya

Gambar 2.8
Resume Rapat Koordinasi Pengisian Data Terpilah BPBD



Gambar 2.9
Foto Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengisian Data Terpilah BPBD

2.4.3 SDM Terlatih PUG

DAFTAR SUSUNAN TIM FOCAL POINT PUG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Agus Heli Djumartono, S.T., M.T.	Pemimpin	Kapala Badan
2	Drs. Bambang Udi Uthoro SH, M.Si	Ketua	Sekretaris
3	Tym Darjo Khamali S.A.P.	Sekretaris	Ketua Tim Kerja Urutan dan Kepengawasan
4	Drs. Yana Mardiana, M.Si.	Anggota	Ka. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5	Bagas Prabhu A., S.E.	Anggota	Ka. Sub Bidang Keuangan
6	Bayang Hidayat Rachman, S.STP., M.Si.	Anggota	Ka. Bidang Koordinasi, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7	Ir. Hary Ajiarta, M.M.	Anggota	Ketua Tim Kerja Pencegahan
8	Drs. Widyo Nugroho	Anggota	Ketua Tim Kerja Kesiapsiagaan
9	Arif Sumekar P.N., S.Sos., M.Si.	Anggota	Ketua Tim Kerja Operasional Koordinasi
10	Aditya Indadi S., S.H.	Anggota	Ketua Tim Kerja Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
11	Alexand Mulhain, S.E.	Anggota	Staf Sub Bidang Keuangan
12	Yannuarie	Anggota	Staf Sub Bidang Keuangan
13	Dianoni Meriya Sari, S.E.	Anggota	Staf Sub Bidang Keuangan
14	A.Rhomadheni Tri Putra, S.Pd	Anggota	Staf Sub Bidang Urutan dan Kepengawasan
15	Susan Mufidah	Anggota	Staf Sub Bidang Urutan dan Kepengawasan
16	Maria Ulfa Ramadhani	Anggota	Staf Sub Bidang Keuangan
17	Ningsi Pematantel	Anggota	Staf Sub Bidang Urutan dan Kepengawasan
18	Joko Siswanto, S.T.	Anggota	Staf Sub Koordinator Pencegahan
19	Retno Indriawati, S.H.	Anggota	Staf Sub Koordinator Pencegahan

20	Dwi Ayu Widya Rahma	Anggota	Staf Sub Koordinator Pencegahan
21	Yanita Pratiwi	Anggota	Staf Sub Koordinator Pencegahan
22	Nawies Gadi Baras Murti	Anggota	Staf Sub Koordinator Pencegahan
23	M. Diki Firmansyah	Anggota	Staf Sub Koordinator Pencegahan
24	Korini Anis Siwantri	Anggota	Staf Sub Koordinator Operasional Kedarifatan
25	Ella, S.H.	Anggota	Staf Sub Koordinator Operasional Kedarifatan
26	Moch Fariq	Anggota	Staf Sub Koordinator Operasional Kedarifatan
27	Dwi Indah Nurul Aulia	Anggota	Staf Sub Koordinator Operasional Kedarifatan
28	Moch Hadi Widjaja	Anggota	Staf Sub Koordinator Operasional Kedarifatan
29	Hari Siwantri	Anggota	Staf Sub Koordinator Operasional Kedarifatan

Tabel 2.1
Daftar Susunan Tim Focal Point PUG BPBD

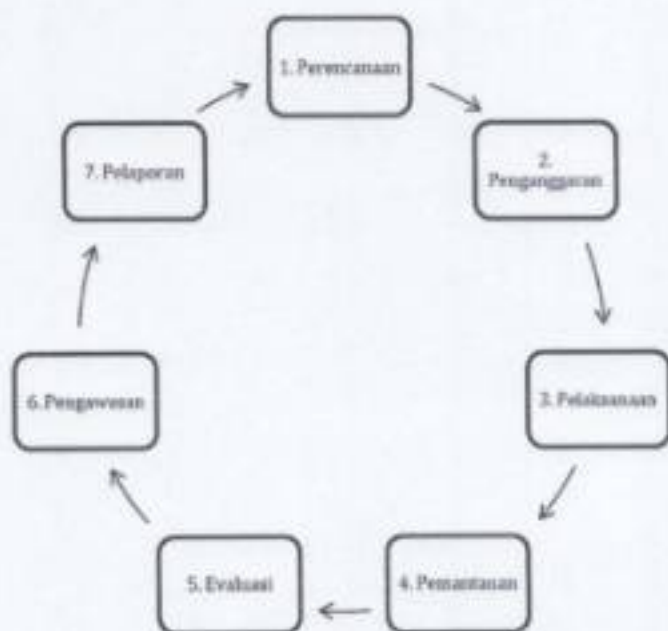
2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya

Sebagai data terpilah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 dapat diakses di https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HOXNTKPT1a0uKtt8H48kjbvGp_mTNgIX/edit?usp=sharing&ouid=106877681330530609027&rtopof=true&sid=true , dan untuk data Januari – Juli 2024 dapat diakses di https://docs.google.com/spreadsheets/d/163_G11CMB62McUPNaiHcT6i4TV2bedB/edit?usp=sharing&ouid=106877681330530609027&rtopof=true&sid=true

BAB III

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



Gambar 3.1
Alur Proses Penyelenggaraan PUG di Perangkat Daerah

3.1 Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling

terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) :

1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

Regulasi atau kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG diantaranya adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
- f. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 113 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya;
- g. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- h. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/168/KPTS/013/2009 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur;
- i. Keputusan Walikota Nomor 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya.

Dokumen Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 selanjutnya akan menjadi pedoman kerja yang responsif gender dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya. Lebih lanjut dokumen Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 akan memberikan gambaran arah dan pedoman kerja yang responsif gender selama periode 5 tahunan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan khususnya bidang penanggulangan bencana. Dokumen tersebut dapat diakses di https://drive.google.com/file/d/17c2lQebUD-8BP3b_CyyX3ZDTvja37BCw/view?usp=sharing.

Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender disusun sebagai acuan dan gambaran bahwa sub kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya telah responsif terhadap isu gender serta telah mengalokasikan anggaran untuk menangani permasalahan gender tersebut. Untuk dokumen GAP, GBS, dan TOR BPBD Kota Surabaya dapat diakses melalui link <https://drive.google.com/drive/folders/1d3WAiqBDoJBmeZE0KKFAU44fJfS0lka?usp=sharing>.

Hasil Analisis Gender Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya adalah adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait semua Sub Kegiatan di ARG-kan.

Alat Analisis Gender yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode Gender Analysis Pathway (GAP). Dokumen GAP disusun menggunakan 9 langkah :

- Pilih kebijakan/program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dianalisa;
- Menyajikan data pembuka wawasan yang merupakan data gender ataupun data terpilah menurut jenis kelamin;
- Susun isu gender diproses perencanaan sub kegiatan dengan menganalisa data pembuka wawasan dan dengan memperlihatkan 4 faktor kesenjangan, yaitu akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat;
- Susun isu gender di internal lembaga atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender;
- Susun isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan;
- Rumuskan kembali tujuan sub kegiatan yang terdapat pada Langkah a, sehingga menjadi responsif gender;

- g. Susun rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi (Langkah c - e) dan sesuai dengan tujuan sub kegiatan yang telah direformulasi (Langkah f);
- h. Tetapkan baseline atau data dasar untuk mengukur progress pelaksanaan sub kegiatan;
- i. Tetapkan indikator kinerja yang responsif gender.

2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki, bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.

Regulasi tentang penganggaran Pengarusutamaan Gender (PUG) diatur pada Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 berkenaan dengan pengarusutamaan gender dan Perwali Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 berkenaan dengan pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender.

Adapun kegiatan responsif gender di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya tahun 2024 diantaranya adalah :

- a. Pembentukan Sekolah/Madrasah Tanggap Bencana, Edukasi Penanggulangan Bencana bagi Bunda PAUD, Pembentukan Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana, Pelatihan dan Rekrutmen Fasilitator Palang Merah Indonesia, dan Pembinaan Potensi Relawan Bencana;
- b. Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana;
- c. Pengadaan Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas untuk kemudian digunakan dalam membantu masyarakat;
- d. Respon cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kejadian bencana maupun kejadian kedaruratan;
- e. Pemenuhan kebutuhan pokok korban bencana dan petugas penanggulangan bencana.

Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp 1,275,312,350
2	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp 368,981,001
3	Penyediaan Perlengkapan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 387,785,137
4	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 19,843,578,031
5	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 2,078,271,078
TOTAL ANGGARAN		Rp 23,953,927,597

Tabel 3.1
Anggaran Responsif Gender BPBD 2024

3.2 Pelaksanaan

Output yang mendukung Pemberdayaan Perempuan pada kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya khususnya di bidang sosial diantaranya adalah :

- Pembentukan Sekolah/Madrasah Tanggap Bencana, Edukasi Penanggulangan Bencana bagi Bunda PAUD, Pembentukan Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana, Pelatihan dan Rekrutmen Fasilitator Palang Merah Indonesia, dan Pembinaan Potensi Relawan Bencana;



Gambar 3.2
Kegiatan Sekolah Tanggap Bencana

- b. Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana;



Gambar 3.3
Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana

- c. Pengadaan Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas untuk kemudian digunakan dalam membantu masyarakat;



Gambar 3.4
Pengadaan Kantong Jenazah

- d. Respon cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kejadian bencana maupun kejadian kedaruratan;



Gambar 3.5
Penanganan Laka oleh Anggota Perempuan BPBD Kota Surabaya

- e. Pemenuhan kebutuhan pokok korban bencana dan petugas penanggulangan bencana.



Gambar 3.6
Pendistribusian Bantuan Logistik pada Korban Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dengan menyediakan layanan pengaduan yaitu Command Center 112 yang beroperasi setiap hari selama 24 jam. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender dengan menyediakan ruang laktasi bagi staf administrasi, satgas kebencanaan, maupun pengunjung yang dilengkapi dengan fasilitas ruang tertutup dan ber-AC serta meja untuk mengganti popok dan air bersih.



Gambar 3.7
Ruang Laktasi BPBD Kota Surabaya

Penerapan kegiatan responsif gender pada internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dilaksanakan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi satgas kebencanaan, diantaranya pelatihan vertical rescue, penanganan

evakuasi jenazah, pelatihan water rescue, pelatihan safety riding, basic life support, pelatihan telemedicine, pelatihan penanganan hewan liar, pelatihan bongkar pasang tenda dan penanganan pengungsi, dan manajemen logistik.



Gambar 3.8
Pelatihan Vertical Rescue



Gambar 3.9
Pelatihan Penanganan Hewan Liar

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Inspektorat Kota Surabaya telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tahun anggaran 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

REKAP PPRG TH 2024 OPD DINAS/BADAN/DAIRAH				
NO	DINAS/BADAN/DAIRAH	ANG BERSI (DURASI) BERSI (MAREK)	LAJANG-PRG (MAREK/TH)	REMARKS
1	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
2	BADAN SARAF	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
3	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
4	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
5	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
6	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
7	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
8	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
9	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
10	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
11	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
12	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
13	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
14	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
15	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
16	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
17	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
18	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
19	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
20	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
21	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
22	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
23	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
24	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
25	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
26	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
27	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
28	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
29	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
30	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
31	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
32	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
33	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
34	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
35	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
36	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
37	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
38	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
39	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
40	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
41	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
42	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
43	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
44	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
45	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
46	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
47	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
48	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
49	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)
50	DISKORUM	0	0	REMARKS: BERSI (TH 1)

Gambar 3.10
Rekap Pengerjaan PPRG 2024

3.4 Pengawasan

Inspektorat Kota Surabaya melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tahun anggaran 2024 pada Badan Perangkulangan Bencana Daerah Kota Surabaya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 melalui dokumen Data Terpilah dan Dokumen GAP GBS TOR pada link <https://drive.google.com/drive/folders/1-bh8Py57LqawutSdAHcPe6NoOW8MraF>

3.5 Pelaporan

Pelaksanaan Pelaporan PUG diwujudkan dalam bentuk pembuatan Profil Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 yang data dukungnya dapat diakses pada link https://drive.google.com/drive/folders/1BH4tzNdyAJ70g6WJRCy-_00cYzNLf7OW?usp=sharing.

BAB IV

TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA

4.1 Analisa



Gambar 4.1
Fishbone Analisa PPRG BPBD Kota Surabaya

4.2 Kesimpulan

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya sudah terlaksana namun belum maksimal dikarenakan beberapa sebab diantaranya :

1. Kurangnya pemahaman terkait konsep gender yang dikarenakan sosialisasi penyusunan dokumen PPRG yang belum maksimal;
2. Kurangnya staf yang bersertifikasi gender yang dikarenakan keterbatasan kuota bintek / diklat terkait gender;
3. Kurangnya koordinasi antar bidang serta rasa kurang percaya korban terhadap petugas dalam memberikan informasi yang dapat menyebabkan tidak lengkapnya dokumen data terpilah;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender.

4.3 Tatalaksana Masalah yang Sudah Dilaksanakan dan Rekomendasi/Saran

- a. Tidak adanya perlakuan berbeda yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam kegiatan sosialisasi mitigasi maupun respon kejadian darurat;
- b. Mengusulkan agar BKPSDM mengadakan bintek / diklat terkait gender dengan

kuota yang lebih banyak, agar dapat meningkatkan SDM yang paham konsep gender di internal PD.

BAB V
**INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITY & SOSIAL INKLUSI),
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUN, DAN PENINGKATAN KUALITAS
KEUARGA**

5.1 Kegiatan dan Inovasi yang telah Dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Perangkoan Berencana Daerah Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI),
Isue Gender Kota Surabaya antara lain :

No.	Mata Inovasi	Daerah Tujuan	Isu	Tujuan
1.	TIM EMAS (Tim Emergency Evaluator)	Peraturan Walikota Surabaya Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kelolaan, Organisasi dan Tatakel EMAS Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 113)	Tim EMAS merupakan tim yang bertugas kegiatan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan di tingkat lokal yang dilaksanakan dengan melakukan sebagai program (PSPD), kegiatan pelayanan dan melakukan evaluasi secara berkala	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan bencana di Kota Surabaya
2.	BU SARACONA (Kebudayaan Dasar Kebudayaan Berencana)	Peraturan Walikota Surabaya Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kelolaan, Organisasi dan Tatakel BPD Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 113)	Aplikasi Bu SARACONA merupakan sistem pelayanan dan manajemen yang terintegrasi memuat data dan peta lokasi untuk memonitoring bencana dengan menggunakan buku	Meningkatkan kemampuan bencana dan pemeliharaan lokasi dan manajemen bencana dan efisiensi dalam pengelolaan bencana
3.	SOSES KETAN (Sosiologi Keliratan Tanggul Bencana)	Peraturan Walikota Surabaya Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kelolaan, Organisasi dan Tatakel BPD Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 113)	Sosiologi Keliratan Tanggul Bencana (SOSES KETAN) memberikan pendidikan kompetensi dalam penanganan bencana dan penyelenggaraan bencana di tingkat kabupaten	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan bencana
4.	PAK TRISAN (Paket Logistik Pengum Berencana)	Peraturan Walikota Surabaya Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kelolaan, Organisasi dan Tatakel BPD	PAK TRISAN merupakan sistem pelayanan dan manajemen untuk memonitoring bencana di tingkat lokal seperti halnya dan pengum	Meningkatkan keterampilan dan keahlian paket logistik untuk

	Kota Surabaya (Dewan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 113)		Prinsip-prinsip di Kota Surabaya
5.	SNVA SNI (Gedung Bancana Cita Diri)	SNVA SNI (Gedung Bancana Cita Diri) memberikan perhatian yang menggunakan dan mudah dipahami bagi audi yang akan memahami secara	Mengingat bahwa nilai-nilai berbasis ke dalam kurikulum pendidikan audi yang akan
	Kota Surabaya (Dewan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 113)		

Tabel 5.1
Inovasi BPPD Kota Surabaya Tahun 2024

BAB VI

PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Sambaya Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2024